

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil peneliti dapatkan di lapangan berupa wawancara penulis dengan informan peneliti terkait dengan bagaimana proses implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar yang peneliti analisis menggunakan teori Van Meter Van Horn. Maka dapat disimpulkan sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya beberapa permasalahan dilapangan ketika pelaksanaan program tersebut. Kendala pertama disebabkan oleh ukuran dan standar kebijakan yang indikatornya mengukur keberhasilan program dengan 6T yaitu tepat harga, jumlah, waktu, jenis, mutu, dan tempat. Untuk indikator tepat harga dan waktu belum tercapai. Karena dalam penyaluran pupuk bersubsidi terkendala tidak tepat waktu dalam pendistribusian pupuk dari distributor yang mengakibatkan kelangkaan pupuk subsidi dan belum tepat harga sesuai dengan HET pupuk bersubsidi sesuai dengan yang telah ditetapkan karena adanya biaya-biaya operasional lain yang harus dilakukan oleh kios pengecer. Distributor juga menghadapi tantangan dalam hal penyediaan pupuk bersubsidi tepat waktu dan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Distribusi yang tidak merata dan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan tepat waktu berkontribusi pada kelangkaan pupuk dan ketidakpuasan di tingkat petani. Perbaikan pada koordinasi antara distributor dan pemerintah serta peningkatan efisiensi logistik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Indikator keadilan yang terdapat ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan kompensasi bagi penyuluh, serta dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada pemilik kios dan petani, penyuluh merasa tidak adil karena menerima besaran uang jalan yang tidak sebanding dengan wilayah kerja yang luas, yang berdampak kepada kualitas pelayanan petani. Pemilik kios dan petani juga merasa tidak adil karena keterbatasan stok pupuk bersubsidi dan distribusi yang tidak merata, terpaksa petani membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi.

Pelaksanaan Penyaluran pupuk bersubsidi ini untuk jumlah sumber daya pelaksanaannya masih kurang. Terutama sumber daya manusia yang ada di balai penyuluh pertanian (BPP) sebagai pelaksana langsung dilapangan itu masih kurang. Untuk jumlah sumber daya penyuluh yang ada di BPP Kecamatan Lintau Buo berjumlah 4 (empat) orang penyuluh nagari, sedangkan jumlah nagari di Kecamatan Lintau Buo ada 5 (lima) Nagari. Sehingga hal ini menyebabkan adanya penyuluh yang memegang 2 nagari binaan. Sedangkan untuk BPP Kecamatan Lintau Buo Utara penyuluh nagarinya berjumlah 3 (tiga) orang dan butuh 2 (dua) orang penyuluh lagi mengingat luas wilayah di Kecamatan lintau Buo Utara.

Selanjutnya indikator Sumber Daya Non-Manusia juga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pengimplementasian program pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar. Masih kurangnya dukungan sumber daya finansial dalam implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi. Kendala lainnya juga dapat dilihat pada variabel karakteristik agen pelaksana, dimana berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada beberapa pegawai di Dinas Pertanian dan di BPP masih belum disiplin, seperti ada yang terlambat masuk kerja dan keluar membeli makanan saat jam kerja. Pada indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik juga masih ditemukannya kendala. Pada kondisi sosial ditemukan kendala seperti Pada kondisi ekonomi juga terkendali masalah pada program penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang diberikan kepada petani dan kebanyakan jumlah pupuk subsidi kurang mencukupi keperluan pupuk bagi petani dan akhirnya petani mengambil pupuk dalam sekali tebus dalam 3 Musim Tanam (MT). Namun kebutuhan pupuk sawah seringkali tidak mencukupi, sehingga petani terpaksa membeli pupuk dengan harga Non-subsidi yang sangat mahal.

Karakteristik agen pelaksana menunjukkan struktur organisasi yang mendukung, namun norma dan aturan di tingkat Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kurang mengikat. Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pertanian, BPP, dan kios pengecer sudah berjalan dengan baik, begitu juga respon positif dari implementor terhadap program ini. Namun, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta dukungan politik, juga mempengaruhi keberhasilan program,

dengan masalah seperti kurangnya pupuk bersubsidi dan mahal biaya produksi yang menjadi tantangan utama. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa aspek yang berjalan baik, banyak faktor yang perlu diperbaiki untuk mencapai implementasi yang efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari wawancara yang telah peneliti kemukakan diatas, maka ada beberapa saran-saran yang dapat diperbaiki dalam implementasi program penyuluh pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Datar tersebut antara lain :

1. Perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi pupuk dari distributor untuk memastikan ketepatan waktu dan harga sesuai HET. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat regulasi dan menambah jumlah titik distribusi untuk meminimalisir keterlambatan.
2. Disiplin dan profesionalisme pegawai di Dinas Pertanian dan BPP harus ditingkatkan melalui pelatihan, monitoring, dan penegakan aturan yang lebih tegas. Hal ini akan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Hendaknya Pemerintah kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP) melakukan penambahan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia untuk penyuluh pertanian di tiap-tiap yang berada di Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan sumber daya manusia dan Non-manusia di sektor pertanian.
4. Untuk para pemilik kios pupuk hendaknya berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh BPP dan gunakan teknologi yang tersedia dan patuhi setiap prosedur atau aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Kementan dan Kemendagri.
5. Diperlukan evaluasi ulang terhadap alokasi stok pupuk bersubsidi agar sesuai dengan kebutuhan riil petani. Penambahan stok dan pengaturan distribusi yang lebih merata dapat mengurangi kelangkaan.